

## OPTIMALISASI PERAN BENDAHARA PENGELUARAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DI BIRO UMUM SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

Yunita Pamenta<sup>1</sup>, Yoel Pasae<sup>2</sup>, Sita Y. Sabanda<sup>3</sup>

[yunitapamntaa@gmail.com](mailto:yunitapamntaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [ypasae@ukipaulus.ac.id](mailto:ypasae@ukipaulus.ac.id)<sup>2</sup>, [sitasabandar@gmail.com](mailto:sitasabandar@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Kristen Indonesia Paulus

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai Sekretariat Daerah Papua Tengah. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif Proses analisis ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sangat krusial dimana bendahara pengeluaran berperan mengelola keuangan sesuai dengan SOP dengan penerapan prinsip akuntansi yang benar, memastikan laporan yang transparan, akurat, dan efisien. 2) Faktor yang menghambat dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, seperti keterlambatan dokumen, koordinasi yang kurang optimal antar bagian unit kerja, dan masalah teknis pada sistem aplikasi yang dihadapkan dengan jaringan internet yang tidak stabil dan Keterbatasan SDM khusus bidang perbendaharaan. 3) Peran Bendahara Pengeluaran dalam mengoptimalkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, dengan mengelola transaksi keuangan yang cermat, pemeriksaan dokumen yang teliti, serta koordinasi yang efektif antar bagian unit kerja, bendahara pengeluaran dapat memastikan bahwa seluruh proses pelaporan berjalan dengan lancar dan tepat waktu, memastikan kelengkapan dan akurasi data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, bendahara pengeluaran tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Peran Bendahara Pengeluaran, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

### Abstrack

*This reseach to analyze the optimization of the role of the Expenditure Treasurer in the preparation of accountability reports at the General Bureau of the Regional Secretariat (SETDA) of Central Papua Province. This research uses a qualitative descriptive approach. The data sources include primary and secondary data. The data collection methods used are observation, interviews with informants, and documentation. The informants in this study consist of 4 employees from the Regional Secretariat of Central Papua Province. The data analysis method uses qualitative descriptive analysis. The analysis process includes three main stages: data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The results of this study show that: 1) The role of the Expenditure Treasurer in the preparation of accountability reports is crucial, as the expenditure treasurer plays a key role in managing finances according to the Standard Operating Procedures (SOP) with the correct application of accounting principles, ensuring that the reports are transparent, accurate, and efficient. 2) Factors hindering the preparation of accountability reports include delays in document submission, suboptimal coordination between work units, technical problems with the application systems, unstable internet connections, and limited human resources, particularly in the field of treasury. 3) The role of the Expenditure Treasurer in optimizing the preparation of accountability reports includes managing financial transactions carefully, verifying documents thoroughly, and coordinating effectively between*

*work units. The expenditure treasurer can ensure that the entire reporting process runs smoothly and on time, ensuring the completeness and accuracy of data, as well as compliance with applicable regulations. The role of the expenditure treasurer is not limited to administrative functions, but also contributes significantly to the transparency, accountability, and efficiency of local government budget management.*

**Keywords:** *Optimization, Role Of Expenditure Treasurer, Preparation Of Accountability Reports.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang transparan dan akuntabel. Salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah bendahara pengeluaran. Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah, bendahara berperan pengeluaran sangat vital dalam memastikan kelancaran proses administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterlambatan penyusunan laporan, ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dan transaksi, hingga kurangnya pemahaman atas regulasi yang berlaku. Bendahara pengeluaran memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan suatu instansi, termasuk di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Tugas utama bendahara pengeluaran adalah menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang yang digunakan untuk keperluan operasional. Biro Umum sebagai salah satu unit kerja strategis di SETDA Provinsi Papua Tengah turut mengalami tantangan serupa.

Objek penelitian ini adalah bendahara pengeluaran pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Peneliti memilih objek ini karena bendahara pengeluaran memiliki peran sentral dalam mengelola dana operasional dan kegiatan biro, serta menjadi ujung tombak dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana optimalisasi peran bendahara pengeluaran dapat meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan. Bendahara pengeluaran didefinisikan sebagai pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan fungsi pengeluaran dana dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Tanggung jawab bendahara tidak hanya bersifat administratif, namun juga substantif dalam menjamin akurasi dan validitas pelaporan keuangan. Penelitian ini juga akan meninjau faktor-faktor yang memengaruhi kinerja bendahara, termasuk aspek kompetensi, sistem informasi keuangan, dan koordinasi internal. Optimalisasi berasal dari kata dasar "optimal", yang berarti terbaik, paling menguntungkan, atau paling efektif. Dalam konteks manajemen pemerintahan, optimalisasi berarti proses meningkatkan fungsi atau kinerja suatu jabatan atau peran agar hasil yang dicapai lebih maksimal, efisien, dan sesuai target yang ditentukan (Kusuma, 2023). Agus Dwi Ratnasari (2024) Optimalisasi dalam manajemen keuangan adalah sistem tindakan untuk mengoptimalkan keseimbangan entitas ekonomi, yaitu upaya mencapai manfaat maksimal dengan risiko minimal. Zulkifli (2020) mendefinisikan optimalisasi sebagai upaya mendapatkan hasil yang "sesuai dan efektif serta efisien" terhadap tujuan yang diharapkan. Tarmizi (2018), optimalisasi adalah usaha meraih hasil maksimal dengan meminimalkan kerugian yaitu pencapaian keuntungan terbesar dengan efisiensi tinggi. SB Ari (2021) menegaskan bahwa optimalisasi adalah proses mencari dan memilih solusi terbaik dari sekumpulan alternatif agar outcome-nya optimal. EGAP Dhimas (2022) menyatakan bahwa optimalisasi berarti "berusaha secara optimal untuk hasil terbaik" dalam penerapan sistem manajemen Kusuma (2023), optimalisasi adalah proses menemukan solusi

terbaik, bukan sekadar keuntungan terbesar, tetapi hasil ideal yang efektif. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini merupakan turunan dari PP No. 12 Tahun 2019 dan menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan APBD. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya dalam Pasal 20 dan 21, yang menyatakan bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pengelolaan dan pertanggungjawaban uang negara. Prosedur penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh Bendahara Pengeluaran, disusun secara sistematis dan sesuai regulasi yang berlaku seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020, PMK No. 162/PMK.05/2013, serta PP No. 12 Tahun 2019.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Deca (2023) meneliti tentang Optimalisasi Peran Bendahara dalam Manajemen Keuangan di RA Raudhatul Jannah Cimerak. Berdasarkan penelitian ini diperoleh temuan bahwa Adapun peran bendahara dalam meningkatkan manajemen keuangan di Lembaga RA Raudhatul Jannah antara lain dilakukan dengan cara: (a) perencanaan anggaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga terkait program-program mana saja yang akan diprioritaskan untuk didanai, (b) bendahara berusaha mendukung kebijakan sekolah yang terkait dengan upaya pencarian sumber dana baru, misalnya dengan penganggaran biaya perjalanan yang rasional, (3) Bendahara menerapkan sistem penggunaan keuangan yang efektif dan transparan, (4) Bendahara menerapkan sistem penggunaan keuangan yang efektif dan transparan. Bendahara selalu melakukan pencatatan keuangan dengan cermat dan selalu membuat laporan keadaan kas kepada atasan untuk dievaluasi, dan (5) Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban secara cermat dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh Deca (2023) berfokus pada optimalisasi peran bendahara dalam manajemen keuangan di lembaga pendidikan, yaitu RA Raudhatul Jannah Cimerak, yang merupakan satuan pendidikan tingkat anak usia dini. Fokus utama dari penelitian tersebut adalah bagaimana bendahara dapat mengelola keuangan lembaga secara efektif, mulai dari perencanaan, pencatatan, penggunaan, hingga pelaporan keuangan dalam lingkup operasional lembaga pendidikan. Deca menyoroti pentingnya keterampilan dasar akuntansi, transparansi penggunaan dana, dan peran bendahara sebagai penanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan yang sederhana namun tetap akuntabel. Sementara itu, penelitian saat ini berjudul "Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah" menempatkan fokus pada institusi pemerintahan tingkat provinsi dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih kompleks, termasuk penggunaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), regulasi perbendaharaan negara, serta standar pelaporan berbasis akuntansi pemerintahan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pengelolaan dana, tetapi lebih dalam lagi pada penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari proses akuntabilitas anggaran pemerintah. Dengan demikian, gap penelitian yang muncul adalah:

1. Perbedaan Konteks Institusi. Penelitian Deca berada di lingkungan pendidikan non-formal dengan struktur keuangan sederhana, sedangkan penelitian saat ini berada di ranah pemerintahan dengan birokrasi, regulasi, dan kompleksitas sistem yang lebih tinggi.
2. Fokus Kajian Berbeda. Penelitian Deca menekankan pada manajemen keuangan secara umum, mulai dari perencanaan hingga pencatatan, sedangkan penelitian ini fokus secara khusus pada penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai produk

akhir dari proses pengeluaran.

3. Tingkat Kompleksitas Tugas Bendahara. Di lembaga pendidikan, peran bendahara cenderung bersifat administratif dan sederhana. Sebaliknya, di lingkungan Biro Umum SETDA, bendahara harus memahami teknis penganggaran, penggunaan aplikasi keuangan daerah, hingga proses audit dan verifikasi.
4. Kebutuhan Kompetensi yang Berbeda. Penelitian saat ini menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi dan regulasi pemerintah, sedangkan Deca lebih menyoroti pada aspek kedisiplinan, tanggung jawab moral, dan pencatatan manual.
5. Tingkat Urgensi Pelaporan. Dalam konteks lembaga pendidikan, pelaporan bersifat internal dan tidak melalui proses audit formal negara, sedangkan pada Biro Umum SETDA, pelaporan menjadi dasar penilaian kinerja dan sangat menentukan kelancaran proses anggaran berikutnya.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian yang belum dijelaskan secara mendalam oleh Deca, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, peran strategis bendahara pengeluaran di pemerintahan, serta tantangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi negara.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui survei internal, ditemukan bahwa sebagian besar laporan pertanggungjawaban belum disusun secara optimal sesuai dengan kaidah akuntansi pemerintahan yang baik. Hal ini berdampak pada penundaan proses verifikasi oleh inspektorat dan keterlambatan pencairan anggaran di periode berikutnya. Survei awal menunjukkan bahwa masih ada pegawai di Biro Umum belum memahami secara menyeluruh sistem informasi keuangan daerah (SIPD) dan menyatakan bahwa pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban masih sangat terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang diharapkan dan kapasitas aktual bendahara pengeluaran. Kurangnya pelatihan teknis, perubahan regulasi yang cepat, serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi peran bendahara. Hal ini diperparah oleh beban kerja yang tinggi dan kurangnya koordinasi antar bagian di internal biro.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem pelaporan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Jika laporan keuangan disusun secara tidak optimal, maka risiko penyimpangan anggaran dan temuan audit akan semakin tinggi. Optimalisasi peran bendahara pengeluaran juga penting untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Ketepatan dan keakuratan laporan keuangan akan membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan berbasis data serta meminimalisir potensi sanksi administrasi dari instansi pengawas.

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait strategi peningkatan kapasitas bendahara pengeluaran, termasuk dalam aspek pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan internal. Di samping itu, melalui penelitian ini diharapkan muncul kesadaran kolektif akan pentingnya sinergi antara bendahara, pejabat pembuat komitmen, dan bagian perencanaan dalam memastikan proses administrasi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan SETDA Provinsi Papua Tengah dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan bendahara secara berkelanjutan, serta memperkuat sistem reward and punishment berdasarkan kinerja.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dari primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data: observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari pegawai Sekretariat Daerah Papua Tengah. Metode analisis data dengan metode analisis deskriptif kualitatif Proses analisis ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi, Bendahara Pengeluaran di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran penyusunan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil observasi, peran utama bendahara pengeluaran adalah mengelola semua transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan pemerintah daerah dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan tepat sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Bendahara juga bekerja sama dengan bagian lain untuk memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam laporan akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat terhadap kelengkapan dan keakuratan dokumen, bendahara pengeluaran turut memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dapat disusun dengan transparan dan akurat, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa faktor yang sering menghambat proses penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterlambatan pengumpulan dokumen. Dokumen-dokumen penting yang harus dikumpulkan dari berbagai bagian sering kali datang terlambat atau bahkan tidak lengkap. Keterlambatan ini tidak hanya mempengaruhi waktu penyusunan laporan, tetapi juga memengaruhi keakuratan dan kelengkapan laporan yang akan disampaikan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar bagian unit kerja juga menjadi salah satu faktor penghambat. Beberapa unit yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sering kali tidak mengirimkan dokumen tepat waktu atau tidak sesuai format yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan bendahara pengeluaran harus melakukan pengecekan ulang atau mengingatkan unit terkait untuk segera menyerahkan dokumen yang diperlukan. Masalah teknis pada sistem aplikasi yang digunakan juga turut memperburuk proses ini. Koneksi internet yang tidak stabil sering kali mengganggu proses pengisian data dan pemrosesan laporan keuangan. Gangguan teknis ini menyebabkan data yang diinput tidak dapat disimpan dengan baik, bahkan dalam beberapa kasus data bisa hilang. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang perbendaharaan juga menjadi faktor penghambat. Staf yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sering kali kurang memiliki kompetensi atau pengalaman yang cukup dalam bidang akuntansi pemerintahan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas tersebut. SDM yang terbatas juga menyulitkan dalam membagi beban kerja yang merata, sehingga mempengaruhi efisiensi proses pelaporan.

Berdasarkan observasi, bendahara pengeluaran berperan penting dalam mengoptimalkan penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda

Provinsi Papua Tengah. Salah satu langkah yang diambil bendahara adalah dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang teliti, sehingga semua dokumen yang masuk sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara juga secara aktif memantau perkembangan pengumpulan dokumen dari berbagai unit kerja dan memberikan pengingat atau dorongan jika ada dokumen yang belum lengkap atau terlambat diterima.

Hasil wawancara terhadap informan pada penelitian menunjukkan bahwa peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah sangat vital dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola keuangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan prinsip akuntansi yang benar. Peran ini sangat penting untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan bersifat transparan, akurat, dan efisien, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut, terdapat beberapa faktor yang menghambat kelancaran penyusunan laporan. Salah satunya adalah keterlambatan dokumen yang diperlukan, yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyusun laporan. Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antar bagian unit kerja dan masalah teknis dalam sistem aplikasi, seperti jaringan internet yang tidak stabil, turut menjadi hambatan signifikan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang perbendaharaan juga menjadi tantangan, terutama saat beban kerja meningkat. Di sisi lain, untuk mengoptimalkan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran memegang peran yang sangat penting. Dengan mengelola transaksi keuangan dengan cermat, melakukan pemeriksaan dokumen secara teliti, serta memastikan koordinasi yang efektif antar bagian unit kerja, bendahara dapat memastikan bahwa seluruh proses pelaporan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, proses pengecekan dan pengumpulan data yang lengkap dan akurat menjadi prioritas utama, yang pada gilirannya mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Bendahara pengeluaran bukan hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Peran Bendahara Pengeluaran dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintahan memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah, salah satu pihak yang memegang peranan kunci dalam proses ini adalah bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran bertugas untuk mengelola dan memastikan setiap pengeluaran anggaran tercatat dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam konteks ini, peran bendahara pengeluaran menjadi sangat strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Bendahara pengeluaran memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang mencerminkan semua transaksi pengeluaran yang terjadi. Laporan ini harus disusun dengan cermat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu kewajiban utama bendahara pengeluaran adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan

tercatat dengan rinci dan jelas. Hal ini meliputi pemantauan setiap pengeluaran dari mulai proses pencairan anggaran hingga realisasi pengeluaran yang digunakan untuk keperluan operasional Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara pengeluaran harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang proses dan prosedur pengelolaan pengeluaran keuangan. Bendahara harus memastikan bahwa setiap transaksi pengeluaran dilakukan berdasarkan dokumen yang sah dan memiliki bukti yang lengkap, seperti kuitansi, nota, atau faktur. Semua pengeluaran harus tercatat dalam sistem akuntansi yang tepat, dan bendahara harus mampu mengidentifikasi setiap transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Proses pencatatan ini tidak hanya untuk kepentingan internal, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi bendahara pengeluaran. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh bendahara harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Prinsip akuntansi yang harus diterapkan mencakup asas relevansi, kewajaran, dan kelengkapan data, serta ketepatan waktu penyusunan laporan. Bendahara harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prinsip-prinsip ini untuk dapat menyusun laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan pihak yang berwenang. Transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai pengelola keuangan, bendahara pengeluaran harus menjaga keterbukaan informasi mengenai setiap transaksi pengeluaran yang dilakukan. Setiap laporan yang disusun harus memuat informasi yang jelas, sehingga dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan transparansi yang tinggi, masyarakat dan instansi lain dapat mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan.

Bendahara pengeluaran juga berperan dalam pengendalian internal keuangan di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Salah satu tugas penting bendahara adalah memastikan bahwa tidak ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan rencana anggaran. Pengendalian ini dilakukan melalui verifikasi yang ketat terhadap setiap pengeluaran yang dilakukan dan memastikan bahwa dokumen pendukungnya lengkap. Selain itu, bendahara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau duplikasi pengeluaran, serta memastikan semua pengeluaran memiliki dasar hukum yang jelas. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan tercatat dengan baik dan didokumentasikan dengan lengkap. Dokumentasi ini mencakup berbagai bukti pengeluaran seperti surat perintah, kuitansi, dan laporan yang mendukung. Dokumentasi yang rapi dan terstruktur tidak hanya mempermudah proses penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga memudahkan proses audit keuangan oleh instansi yang berwenang. Dengan dokumentasi yang lengkap, bendahara dapat mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang dilakukan dengan lebih mudah.

Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah juga melibatkan koordinasi yang baik antara bendahara pengeluaran dan berbagai pihak terkait lainnya, seperti kepala bidang, unit pengelola anggaran, serta auditor internal dan eksternal. Koordinasi yang baik ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang disusun mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, bendahara pengeluaran harus

mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak lain dalam proses penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban yang baik memerlukan ketepatan waktu. Bendahara pengeluaran harus memastikan bahwa laporan disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang disusun tepat waktu akan memungkinkan pihak-pihak yang berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Keterlambatan dalam penyusunan laporan dapat menimbulkan ketidakpastian dan mempengaruhi kredibilitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap proses pengelolaan keuangan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan atau potensi masalah yang dapat mempengaruhi akurasi laporan. Berdasarkan hasil evaluasi, bendahara dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap prosedur yang ada untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan akuntabel di masa depan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bendahara pengeluaran di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. Pelatihan ini bertujuan untuk memperbaharui pengetahuan bendahara tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, teknik akuntansi pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Dengan kompetensi yang baik, bendahara dapat mengelola pengeluaran dengan lebih efektif dan menyusun laporan yang lebih akurat dan transparan. Keberhasilan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu tidak hanya berpengaruh pada pengelolaan internal pemerintah, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ketika laporan keuangan disusun dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan merasa lebih yakin bahwa anggaran yang dialokasikan untuk keperluan birokrasi benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, bendahara pengeluaran memiliki peran strategis dalam membangun dan menjaga kepercayaan ini. Bendahara pengeluaran di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup peraturan yang mengatur tata cara pengeluaran anggaran. Penggunaan sistem akuntansi modern ini juga membantu meminimalkan risiko kesalahan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Peran bendahara pengeluaran dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah sangatlah besar. Melalui pengelolaan pengeluaran yang teliti, penyusunan laporan yang transparan dan akurat, serta penerapan prinsip akuntansi yang berlaku, bendahara pengeluaran turut memastikan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, peran bendahara pengeluaran bukan hanya sebatas teknis administratif, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola keuangan yang baik dan penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

### **Faktor yang menghambat dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah daerah merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah, terdapat sejumlah faktor yang sering kali menghambat kelancaran proses ini. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan

dengan aspek teknis, tetapi juga dengan koordinasi antar bagian, ketersediaan dokumen, serta permasalahan sistem yang digunakan. Pemahaman terhadap faktor-faktor penghambat ini penting untuk memperbaiki dan mempercepat proses penyusunan laporan yang efisien dan akurat. Salah satu faktor yang sering menghambat penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung. Setiap bagian dalam organisasi memiliki kewajiban untuk mengirimkan dokumen yang diperlukan, seperti kuitansi, nota, surat perintah, dan lainnya. Namun, sering kali dokumen-dokumen tersebut datang terlambat atau belum lengkap. Tanpa dokumen yang lengkap dan tepat waktu, laporan keuangan tidak dapat disusun dengan akurat, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan secara keseluruhan. Koordinasi antar bagian yang kurang optimal juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap bagian atau unit yang terlibat dalam pengeluaran anggaran memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan dokumen yang relevan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, ketidakteraturan dalam pengiriman dokumen dari masing-masing bagian, atau kurangnya komunikasi antar bagian, sering kali menjadi kendala yang memperlambat proses penyusunan laporan. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam penyusunan laporan yang sudah mengarah pada penyelesaian, namun terhambat oleh satu atau beberapa bagian. Proses verifikasi dokumen juga bisa memakan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas memerlukan pemeriksaan tambahan, yang terkadang melibatkan proses komunikasi yang lebih panjang antara bendahara pengeluaran dan unit-unit terkait. Hal ini menyebabkan laporan pertanggungjawaban tidak bisa diselesaikan tepat waktu, mengingat setiap dokumen harus diverifikasi untuk memastikan kebenarannya sebelum dicatat dalam laporan. Meskipun teknologi informasi telah berkembang pesat, di beberapa bagian di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah masih ada ketergantungan pada penggunaan data manual, seperti catatan tangan atau laporan cetak. Proses konversi data manual ke dalam format digital memerlukan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Selain itu, jika data manual tidak terorganisir dengan baik, akan mempengaruhi kelancaran proses pengolahan data dalam sistem aplikasi. Beberapa masalah juga muncul akibat kurangnya pembaruan pada sistem aplikasi yang digunakan. Jika aplikasi tidak diperbarui secara berkala atau tidak kompatibel dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, maka hal ini dapat menghambat proses penyusunan laporan. Pembaruan yang lambat atau tidak dilakukan dapat membuat sistem menjadi tidak efisien, menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan data atau bahkan ketidaksesuaian dengan standar akuntansi terbaru. Di beberapa wilayah di Papua Tengah, masalah infrastruktur seperti gangguan listrik atau pemadaman sering terjadi. Gangguan ini dapat memperlambat proses penyusunan laporan karena sistem yang digunakan bergantung pada listrik dan koneksi internet. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, proses pengisian data dan pencatatan transaksi keuangan bisa terhenti atau tertunda. Birokrasi yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban mungkin tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hal ini menjadi penghambat ketika proses penyusunan laporan tidak dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemahaman yang tidak cukup tentang standar akuntansi atau prosedur pelaporan yang benar dapat mengarah pada kesalahan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Beban kerja yang tinggi pada petugas atau staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban juga dapat menjadi faktor penghambat. Ketika staf memiliki banyak tugas lain yang harus

diselesaikan selain penyusunan laporan, fokus dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan akan terpecah. Hal ini berpotensi memperlambat penyusunan laporan atau mengurangi kualitas hasil laporan.

Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban memerlukan waktu yang cukup lama, terutama jika dokumen yang diperlukan tidak lengkap atau terlambat diterima. Keterbatasan waktu ini sering kali menjadi faktor penghambat dalam menyusun laporan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kurangnya waktu yang cukup untuk memproses semua data juga dapat menyebabkan kelalaian dalam penyusunan laporan. Tiap bagian atau unit di dalam organisasi mungkin memiliki prosedur yang berbeda dalam menyusun dan mengirimkan dokumen keuangan. Ketika prosedur ini tidak seragam, penyusunan laporan menjadi lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama untuk menyatukan semua data yang diperlukan. Keberagaman prosedur ini sering kali menjadi salah satu hambatan utama yang memperlambat proses pelaporan. Dukungan yang tidak maksimal dari pihak manajemen atau pimpinan di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah juga dapat mempengaruhi kelancaran penyusunan laporan. Tanpa adanya dorongan yang cukup dari manajemen untuk memastikan seluruh bagian bekerja sama dengan baik dan tepat waktu, penyusunan laporan pertanggungjawaban bisa terhambat. Kepemimpinan yang kurang mendukung akan mengurangi urgensi penyelesaian laporan tepat waktu. Faktor kompleksitas proses administrasi yang ada dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban juga sering menghambat kelancaran penyusunan laporan. Proses yang memerlukan berbagai tahapan dan pengesahan dari berbagai pihak menjadikan penyusunan laporan sebagai tugas yang panjang dan rumit. Semakin banyak tahapan yang perlu dilalui, semakin besar kemungkinan terjadinya keterlambatan atau masalah lainnya. Faktor yang menghambat kelancaran penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Faktor-faktor seperti keterlambatan dokumen, koordinasi yang kurang baik antar bagian, dan masalah teknis pada sistem aplikasi dapat memperlambat proses tersebut. Oleh karena itu, untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas laporan, perlu ada perbaikan dalam aspek manajerial, teknis, dan infrastruktur yang mendukung proses penyusunan laporan pertanggungjawaban.

### **Peran Bendahara Pengeluaran dalam mengoptimalkan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah.**

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu tugas penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Laporan yang disusun dengan baik mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, yang sangat penting dalam meyakinkan publik dan pihak berwenang mengenai penggunaan anggaran negara yang tepat. Dalam hal ini, peran bendahara pengeluaran sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan benar dan setiap dokumen pendukung lengkap. Sebagai ujung tombak dalam proses ini, bendahara pengeluaran tidak hanya berfungsi sebagai pencatat transaksi, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan kelengkapan dan kebenaran data yang dikumpulkan. Bendahara pengeluaran memegang tanggung jawab utama dalam pengelolaan transaksi keuangan di setiap unit organisasi. Sebelum laporan pertanggungjawaban dapat disusun, seluruh pengeluaran harus tercatat dengan baik dan didukung oleh dokumen yang sah. Dalam hal ini, peran bendahara sangat vital dalam memeriksa, mencatat, dan memastikan bahwa setiap transaksi didokumentasikan dengan lengkap. Jika bendahara pengeluaran dapat melakukan tugas ini dengan baik, penyusunan laporan pertanggungjawaban akan

menjadi lebih cepat dan akurat, karena tidak ada data yang terlewat atau tidak tercatat.

Bendahara pengeluaran juga memiliki peran proaktif dalam memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah diterima tepat waktu. Seringkali, masalah yang terjadi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban berkaitan dengan keterlambatan atau kekurangan dokumen yang belum masuk. Dalam hal ini, bendahara pengeluaran harus mampu mengingatkan dan berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait agar dokumen dapat diserahkan tepat waktu. Jika bendahara pengeluaran dapat menjalankan peran ini dengan baik, laporan pertanggungjawaban dapat disusun dengan lebih cepat tanpa adanya hambatan dari kekurangan dokumen. Pengeluaran perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang masuk sesuai dengan format yang ditetapkan. Banyak kendala yang dapat muncul ketika dokumen yang diserahkan tidak sesuai dengan standar atau format yang berlaku. Upaya mengoptimalkan penyusunan laporan pertanggungjawaban, bendahara pengeluaran perlu memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang ada. Sistem aplikasi keuangan yang digunakan di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah harus dapat mendukung pengelolaan data dengan efisien dan akurat. Bendahara pengeluaran perlu memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem aplikasi sudah lengkap dan terstruktur dengan baik. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat mempercepat proses penyusunan laporan, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, meskipun sistem aplikasi dapat membantu, peran bendahara pengeluaran dalam memeriksa dan mengelola dokumen tetap sangat penting. Teknologi memang dapat mempermudah proses pengolahan data, tetapi tanpa pengelolaan dokumen yang baik, sistem tersebut tidak akan efektif. Oleh karena itu, penting bagi bendahara pengeluaran untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diterima sesuai dengan standar dan siap diproses dalam sistem aplikasi. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban dapat disusun dengan lebih cepat dan hasilnya pun lebih akurat.

Penting bagi bendahara pengeluaran untuk tetap update dengan peraturan dan kebijakan terbaru terkait pengelolaan keuangan negara. Peraturan yang sering berubah dapat mempengaruhi cara penyusunan laporan pertanggungjawaban, sehingga bendahara pengeluaran harus selalu mengikuti perkembangan kebijakan yang berlaku. Dengan mengikuti perkembangan ini, bendahara dapat memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun selalu sesuai dengan regulasi yang terbaru, sehingga tidak ada pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan keuangan. Bendahara pengeluaran juga harus mampu mengelola waktu dengan baik. Penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada waktu yang tersedia untuk memproses dan menyusun laporan. Bendahara pengeluaran perlu merencanakan waktu dengan efektif dan memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, proses penyusunan laporan dapat berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan yang menghambat penyelesaian laporan. Peran bendahara pengeluaran yang proaktif juga berkontribusi dalam menjaga kualitas laporan pertanggungjawaban. Ketika ada dokumen yang belum lengkap atau ada data yang terlewat, bendahara pengeluaran harus segera bertindak untuk melengkapinya. Dengan sikap proaktif ini, proses penyusunan laporan dapat berjalan dengan lebih efisien dan hasilnya pun lebih akurat. Selain itu, sikap proaktif ini juga menunjukkan komitmen bendahara pengeluaran untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara pengeluaran juga harus memperhatikan integritas dan akuntabilitas. Proses penyusunan laporan

pertanggungjawaban bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bendahara pengeluaran yang berintegritas akan memastikan bahwa laporan yang disusun mencerminkan keadaan yang sebenarnya, tanpa adanya manipulasi data atau informasi yang disembunyikan. Peran bendahara pengeluaran sangat penting dalam mengoptimalkan penyusunan laporan pertanggungjawaban di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah. Melalui pengelolaan transaksi yang cermat, pemeriksaan dokumen yang teliti, dan koordinasi yang baik antar bagian, bendahara dapat mempercepat proses penyusunan laporan dan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, peran bendahara pengeluaran bukan hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga berkontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

### **KESIMPULAN**

1. Verifikasi dan Persetujuan Dalam Proses Pengajuan Dana Hibah di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, melalui beberapa tahap diantaranya: Tahap Pertama Penerimaan dan Verifikasi Dokumen; Tahap Kedua Evaluasi Kesesuaian Program dengan Prioritas Daerah; Tahap Ketiga Verifikasi Anggaran oleh Biro Keuangan; Tahap Keempat Persetujuan dari Atasan; dan Tahap Kelima Pengawasan dan Pertanggungjawaban.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam Verifikasi dan Persetujuan Dalam Proses Pengajuan Dana Hibah di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, meliputi : ketidaklengkapan dokumen, kurangnya transparansi dari pihak pengaju hibah, serta koordinasi yang kurang efektif antar biro yang terlibat, lamanya waktu persetujuan dari atasan dan pengawasan pasca-pencairan sering terhambat oleh kurangnya informasi rinci.
3. Proses verifikasi dan persetujuan dalam pengajuan dana hibah di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan memulai dari verifikasi kelengkapan dokumen hingga memastikan kesesuaian proposal dengan prioritas pembangunan daerah, seluruh tahapan dilakukan dengan cermat untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ari, S. B. (2021). Konsep optimalisasi dalam proses pengambilan keputusan. Diakses dari <https://repository.unimar-amni.ac.id>
- Deca (2023) meneliti tentang Optimalisasi Peran Bendahara dalam Manajemen Keuangan di RA Raudhatul Jannah Cimerak. *EKODESTINASI Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata*, Vol. 1. No. 1., April Tahun 2023, Hal.13-19. DOI: <https://doi.org/10.59996/ekodestinasiv1i1.18>.
- Dhimas, E. G. A. P. (2022). Penerapan optimalisasi sistem manajemen keuangan. Diakses dari <https://repository.unimar-amni.ac.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri RI. Diakses dari <https://jdih.kemendagri.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kurniawan, A. (2021). Metodologi Penelitian Sosial: Teori dan Praktik Penulisan Ilmiah.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusuma, W. H. (2023). Optimalisasi peran dalam efektivitas organisasi publik. Diakses dari <https://repository.uinfasbengkulu.ac.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ratnasari, A. D. (2024). Optimalisasi dalam manajemen keuangan: Pendekatan efisiensi dan keseimbangan entitas. *Jurnal ITTC*. Diakses dari <https://jurnal.ittc.web.id>
- Tarmizi. (2018). Efisiensi dan optimalisasi kinerja dalam lembaga pemerintahan. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id>
- Zulkifli. (2020). Efektivitas dan efisiensi dalam optimalisasi kebijakan organisasi. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id>.